

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Purwokerto masih terbilang rendah. Hal tersebut berdasarkan pengukuran pada ketiga indikator peran pemerintah dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Aspek regulator berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis tidak mengetahui isi peraturan mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis. Beberapa orang memang pernah mendengar tentang peraturan tersebut, namun kebanyakan mereka tidak tahu isi peraturan tersebut. Bahkan ada beberapa gelandangan dan pengemis yang tidak tahu bahwa mengemis itu dilarang terutama anak-anak dan pengemis lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah. Sosialisasi dilakukan setelah gelandangan dan pengemis tersebut dirazia, sedangkan gelandangan dan pengemis yang tidak pernah terkena razia mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar gelandangan dan pengemis pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut

berupa uang maupun bahan makanan dan sembako. Dan beberapa dari responden mengaku masih menerima bantuan tersebut, namun bantuan tersebut lantas tidak membuat mereka berhenti menjadi pengemis.

Selain peraturan yang mengatur penanggulangan gelandangan dan pengemis, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membuat kebijakan untuk merazia gelandangan dan pengemis yang kemudian dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ada di Purwokerto sudah pernah terkena razia oleh pemerintah. Bahkan ada beberapa gelandangan dan pengemis yang sering terkena razia atau lebih dari dua kali terkena razia. Namun hal tersebut ternyata tidak membuat mereka berhenti untuk mengemis, karena rendahnya mental sosial dan agama sehingga mengemis sudah menjadi budaya bagi mereka.

2. Aspek pemeliharaan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan bagi gelandangan dan pengemis yang telah dirazia. Sebelum dibina pemerintah mengadakan pendataan bagi gelandangan dan pengemis hasil razia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian gelandangan dan pengemis berasal dari luar Kabupaten Banyumas yang tinggal mengontrak di Purwokerto. Dan hampir seluruh gelandangan dan pengemis sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka miliki.

Setelah pendataan, pemerintah yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas mengadakan pembinaan dan pembimbingan bagi gelandangan dan pengemis diantaranya yaitu bimbingan mental sosial dan agama, bimbingan informasi dasar mengenai HIV/AIDS, bimbingan kesadaran untuk menabung, bimbingan keluarga, dan bimbingan kesadaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis yang dirazia pernah mendapat pembinaan dan pembimbingan tersebut. Namun ada beberapa responden mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pembinaan dan pembimbingan tersebut. Pembinaan dan pembimbingan tersebut dirasa kurang efektif karena tidak mampu membuat mereka berhenti untuk mengemis. Alhasil mereka tetap kembali turun kejalan untuk mengemis.

3. Aspek fasilitator pemerintah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ditunjukan dengan memberikan pengetahuan keterampilan dan kewirausahaan serta memberikan dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada gelandangan dan pengemis hasil razia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis yang pernah dirazia pernah mendapatkan pengetahuan keterampilan dan kewirausahaan seperti membuat kerajinan, membuat makanan, membuat rambut palsu (*wig*) dan bulu mata, menjahit serta pelatihan usaha lainnya. Namun karena tidak telaten dan penghasilan dari membuat kerajinan tersebut tidak mencukupi pengetahuan keterampilan dan kewirausahaan

tersebut kurang bermanfaat. Akhirnya mereka lebih memilih untuk mengemis karena penghasilan yang mereka dapatkan dari mengemis lebih besar daripada membuat kerajinan tersebut.

Selain itu sebagian besar gelandangan dan pengemis yang drafia juga mengaku tidak pernah mendapatkan dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh pemerintah. Ada beberapa yang mengaku pernah mendapat bantuan untuk usaha dalam bentuk barang maupun bahan sembako, namun mereka mengaku bantuan tersebut tidak digunakan untuk usaha melainkan dikonsumsi sendiri.

Selain hal tersebut sebagai fasilitator pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis berpendapat bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan baik, namun kurang dalam menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran pemerintah dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis dapat dikemukakan implikasi antara lain:

1. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam aspek regulator dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Purwokerto yang masih rendah, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis bagi masyarakat luas baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Selain itu, dalam merazia gelandangan dan pengemis seharusnya dilakukan lebih menyeluruh lagi bukan hanya dipusat keramaian, namun ke pertokoan, pasar-pasar maupun tempat ibadah di perkotaan. Pemerintah harus memiliki data akurat mengenai persebaran dimana gelandangan dan pengemis biasa berkeliaran, sehingga razia dapat dilakukan secara menyeluruh.
2. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam aspek pemeliharaan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Purwokerto yang masih rendah, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan isi materi bimbingan agar tujuan dari bimbingan tersebut tercapai. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu mendirikan panti rehabilitasi sosial guna membina gelandangan dan pengemis untuk meningkatkan kesadaran dan merubah pola pikir serta sikap gelandangan dan pengemis agar tidak kembali mengemis.

3. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam aspek fasilitator dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Purwokerto yang masih rendah, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi gelandangan dan pengemis seperti memberikan pekerjaan yang layak untuk mereka agar mempunyai penghasilan yang cukup. Dan memberikan keterampilan yang memiliki nilai jual tinggi melalui balai latihan kerja bagi gelandangan dan pengemis usia produktif untuk meningkatkan kompetensi para gelandangan dan pengemis agar bisa hidup mandiri. Serta mendirikan panti jompo bagi gelandangan dan pengemis yang berusia lanjut.

